

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik

Menurut Budihardjo (2008:367) Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Sedangkan menurut Rahman (1998 : 128), menyatakan bahwa partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Dalam negara demokrasi, partisipasi politik berperan penting dalam jalannya sebuah roda pemerintahan yang demokratis. Kegiatan ini

seperti memberikan suara pada pemilihan umum ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam kancah politik.

Berdasarkan uraian beberapa ahli tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan tindakan yang dilakukan seseorang individu atau kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang merupakan indikasi aktif dari pemilih terhadap kehidupan politik..

B. Intensitas partisipasi Politik

Kegiatan politik tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan, jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan dari partai dan kelompok kepentingan.

Ada yang menyamakan dua jenis gejala ini dengan piramida yang basisnya lebar, tetapi menyempit ke atas sejalan dengan meningkatnya intensitas politik. Diantara basis dan puncak terdapat kegiatan yang berbeda-beda

intensitasnya, berbeda menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen orang yang bersangkutan.

Miriam Budihardjo (1998:6-7) menjelaskan Intensitas berpartisipasi politik yakni aktifis, partisipan, pengamat dan orang apolitis. Secara lebih jelas, dapat dilihat dari hal berikut:

1. Aktivis
Yaitu dengan menjadi pejabat partai dan dengan sepenuh waktu memimpin partai atau kelompok kepentingan.
2. Partisipan
Yaitu berperan sebagai petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan dan aktif dalam proyek-proyek sosial.
3. Pengamat
Biasanya golongan ini selalu menghadiri rapat umum, menjadi anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, selalu mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam pemilihan umum.
4. Orang apolitis
Yaitu yang tidak ikut dalam pemilihan umum dan bersikap acuh tak acuh terhadap dunia politik.

Partitipasi politik dapat berbentuk konvensional (voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi) maupun non-konvensional (demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda, tindak kekerasan politik terhadap manusia, perang gerilya dan revolusi) (Mas'ood, 2001:33)

Partisipasi politik masa di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya serta sistem politik yang disusunnya. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk mengirim utusan pendukung kepusat pemerintahan, membuat pernyataan

- mendukung kebijakan pemerintah, memilih calon yang ditawarkan oleh organisasi politik yang dibina dan dikembangkan pemerintah dan sebagainya.
2. Partisipasi politik dimaksudkan sebagai usaha menunjukkan kelemahan penguasa dengan harapan penguasa merubah maupun memperbaiki kelemahan tersebut. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk petisi, resolusi, mogok, demonstrasi dan sebagainya.
 3. Partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya, sehingga terjadi perubahan pemerintahan atau system politik. Partisipasi ini biasanya diwujudkan dengan mogok, pembangkangan politik, huru-hara. (Iskandar dalam Skripsi Ailiyawati, Nur 2006: 20)

Bentuk dan intensitas politik dipengaruhi oleh organisasi kolektif, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Kelas*
Perorangan dengan status social, pendapatan serupa atau pekerjaan serupa
- b. *Kelompok/ komunal*
Perorangan dari ras, agama, bahasa dan etnisitas yang sama
- c. *Lingkungan (neighborhood)*
Perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- d. *Partai*
Perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan control bidang-bidang eksekutif dan legislative pemerintah.
- e. *Golongan (faction)*
Perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan *patro-klien*, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik di antara perorangan yang mempunyai system status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat. (Iskandar dalam Skripsi Ailiyawati, Nur 2006: 17)

C. Penyebab Terjadinya Partisipasi Lebih Luas

Menurut Myron Weiner paling tidak ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:

1. Modernisasi
Masyarakat yang merasa bahwa mereka ternyata dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka semakin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial
Begitu terbentuknya suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern
Kaum intelektual, filosof, pengarang, dan wartawan sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk mengembalikan tuntutan akan partisipasi yang luas dalam perubahan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern, ide demokratisasi partisipasi telah tersebar ke bangsa-bangsa baru merdeka jauh sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
4. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik
Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar hak-hak ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangan melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan social, ekonomi dan kebudayaan
Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesepakatan untuk ikut dalam pembuatan keputusan politik. (Rahman,2002:130).

Banyaknya partisipasi politik merupakan satu tuntutan partisipasi, dimana keyakinan yang tersebar luas, terutama dikalangan kaum muda terhadap

demokrasi partisipan. Dorongan utamanya adalah kenyataan bahwa dalam Negara-negara demokrasi keputusan-keputusan politik selalu dibuat oleh sekelompok orang yang sudah “mapan (*establishment*)”, yaitu orang yang secara ekonomik memiliki hak istimewa dan secara politik sangat kuat. Pemecahan masalah ini adalah dengan membawa masalah pembuatan keputusan itu ke tingkat masyarakat bawah dan kelompok-kelompok kecil, yaitu kembali ke masyarakat. Sebagai akibatnya, penduduk akan dapat menguasai masalah dan bertindak secara politik demi kepentingan mereka. Tetapi kenyataan fundamental yang harus diperhatikan adalah apakah demokrasi partisipan langsung benar-benar mungkin dijalankan dalam bangsa-bangsa modern yang dihadapkan pada keadaan-keadaan dan masalah-masalah dunia yang rumit seperti sekarang ini. (Mas’oed, 2001:40).

D. Indikator Partisipasi Masyarakat

Loina Lalolo (2003:23) Menjelaskan beberapa indikator partisipasi, yaitu:

1. Adanya jaminan hukum dari pemerintah mengenai partisipasi masyarakat
2. Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif
3. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan keputusan.
4. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat.

Jadi indikator partisipasi ini dapat dilihat dari adanya jaminan hukum dari pemerintah mengenai partisipasi masyarakat, serta adanya suatu wadah dalam masyarakat guna menampung partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan dari keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan yang menyangkut dengan pemilu.

E. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membedakan dua jalur pendidikan. Yakni pendidikan Formal dan pendidikan Informal. Pendidikan formal yakni, pendidikan dasar (SD,SMP), Pendidikan menengah(SMA) dan pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi). Selain itu, pada jalur informal adalah pendidikan yang didapat diluar sekolah, yang harus berkesinambungan dan berjenjang, seperti kursus, dan sebagainya. (Dr. Umar Tirtarahardja,2005:164)

Berdasarkan pernyataan diatas, tingkatan pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berdasarkan pada jalur pendidikan formal, dimana terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni : pendidikan dasar, pendidikan rendah, dan pendidikan tinggi.

Menurut Shofifah “Kesadaran politik tidak muncul secara alami begitu saja, melainkan sebagai akibat dari pendidikan politik yang dipraktikkan baik dalam rumah tangga, sekolah maupun masyarakat” (suara-muhammadiyah.com /2009/?p=545).

Sejalan dengan pernyataan diatas, pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang diterimanya membentuk suatu kesadaran politik dan kesadaran politik sendiri merupakan aspek penting untuk melihat intensitas partisipasi politik masyarakat dan ini diperkuat pernyataan

Jefry M. Paige (www.mediaindo.co.id) yang memberikan dua indikator dalam menjelaskan intensitas atau cara partisipasi politik, yakni:

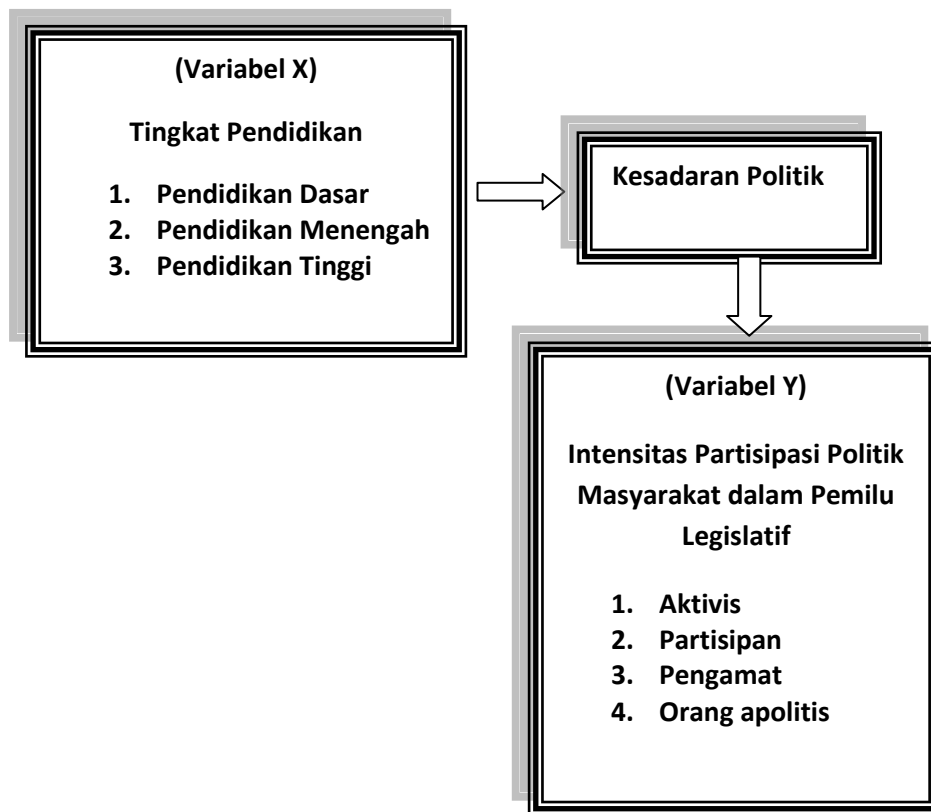
“Pertama, kesadaran politik yakni kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menyangkut pengetahuannya mengenai lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut minat dan perhatiannya terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Kedua, kepercayaan politik yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada, apakah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak”.

Kesadaran Politik mempunyai pengertian yakni suatu kewajiban untuk mengambil bagian dalam aktivitas input politik, termasuk kompetensi untuk mengambil bagian dalam aktivitas input politik. Tentu saja untuk mengikuti aktivitas politik dan pemerintah menaruh perhatian pada urusan politik hanyalah merupakan komitmen politik yang serba terbatas (Almond, 1984:66)

Dengan demikian tidak ada partisipasi politik tanpa ada kesadaran politik dalam proses pengambilan keputusan politik. Kesadaran politik menimbulkan unsur-unsur kognitif dari orientasi politik. Maka masyarakat Kelurahan Yosorejo harus menyadari dan mengetahui tentang system politik baik aspek politik maupun aspek pemerintahan di Kota Metro yaitu mengenai eksekutif, legislative dan yudikatif.

Secara singkat kerangka pikir penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



F. Hipotesis

Menurut Prasetyo: dan Jannah (2005:76), hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua atau lebih variabel yang dikenal sebagai hipotesis kausal. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_0 : Tingkat Pendidikan baik tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi yang membentuk kesadaran politik masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009.

H_a : Tingkat Pendidikan baik tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi yang membentuk kesadaran politik masyarakat berpengaruh signifikan terhadap intensitas partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009.